

## BAB I

### PENDAHULUAN.

#### 1.1 Latar Belakang.

Penerapan good governance yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan baik dalam penerimaan pendapatan penganggaran, pengeluaran dan pelaporan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi terkomputerisasi khususnya Pemerintah Provinsi Bali dalam menjalankan aktivitas Pemerintahannya sudah 2 (dua) kali melakukan penggantian penggunaan sistem informasi terkomputerisasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Pemerintah Provinsi Bali pada awalnya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam mengakses penerimaan pendapatan, penganggaran kegiatan, pengeluaran kegiatan, dan pelaporan keuangan. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) diperkenalkan tanggal 29 Agustus 2006 oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah bertepatan pelaksanaan kegiatan Forum SAKD di Pusdiklat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Ciawi Bogor.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diresmikan dan mulai digunakan awal tahun 2013 oleh Kementerian Dalam Negeri dan diberlakukannya system pencatatan kas secara akrual basis yang merupakan peralihan dari kas basis. Pemerintah Provinsi Bali menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu dipergunakan sebagai alat bantu meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas efesiensi, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini merupakan salah satu fasilitasi sistem informasi terkomputerisasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah untuk penguatan persamaan persepsi sistem dan

prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Bali menggunakan sistem informasi akan banyak memberikan manfaat meliputi : pekerjaan dikerjakan lebih cepat dan dapat diakses oleh pihak yang memerlukan. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi akan banyak memberikan kemajuan bagi penggunanya dalam melakukan aktivitas tetapi masih ada masalah dalam memanfaatkan sistem informasi secara optimal baik dalam menganggarkan kegiatan, merealisasikan kegiatan dan pelaporan keuangan. Masalah yang terjadi adalah realisasi penyerapan anggaran belanja pada akhir tahun anggaran kegiatan, sisa anggaran belanja terlalu tinggi. Selain itu pegawai jarang mendapat pelatihan khusus sesuai beban kerjanya masing-masing, adanya keterbatasan jumlah pegawai sesuai beban kerjanya masing-masing dan terbatasnya pegawai yang memiliki pendidikan khusus sesuai beban kerjanya masing-masing,

Sisa anggaran belanja terlalu tinggi pada akhir tahun anggaran kegiatan menjadi pertanyaan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik Pusat maupun Daerah sebagai aspirasi rakyat merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Bali atas realisasi penyerapan anggaran belanja yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sisa realisasi penyerapan anggaran belanja semestinya direalisasikan semuanya pada tahun anggaran bersangkutan karena dana yang digunakan untuk menganggarkan sudah membatalkan anggaran belanja kegiatan lain yang semestinya bisa di gunakan untuk menganggarkan kegiatan yang belum dianggarkan tahun lalu. Sisa anggaran belanja terlalu tinggi pada akhir tahun anggaran kegiatan juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bali di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Hubungan Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkaitan

dengan teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan prinsipel dan agen dimana Anggota DPR sebagai prinsipel membuat suatu kontrak kerja dengan Pemerintah Provinsi Bali sebagai agen dengan harapan agen akan bertidak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipel (dalam hal ini terjadi pendelogasian wewenang). Peningkatan sisa anggaran belanja lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut

**TABEL 1.1**  
**REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN 2022**

NO	TAHUN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (%)
1	2012	4.102.658.268.327	3.562.732.996.631	539.925.271.696	13,16
2	2013	4.562.576.195.022	3.868.740.441.639	693.835.753.383	15,21
3	2014	5.051.006.963.462	4.491.645.550.255	559.361.413.207	11,07
4	2015	5.560.963.656.157	4.999.030.923.541	561.932.732.616	10,10
5	2016	5.816.331.660.212	5.420.933.529.303	395.398.130.909	6,80
6	1917	4.774.215.646.165	4.348.259.186.136	425.956.460.029	8,92
7	2018	6.595.712.545.306	5.998.547.032.281	597.165.513.025	9,05
8	2019	7.201.196.359.769	6.518.313.866.322	682.882.493.447	9,48
9	2020	6.924.582.165.725	6.358.121.475.263	566.460.690.462	8,18
10	2021	7.903.323.253.052	6.270.667.217.646	1.632.656.035.406	20,66
11	2022	5.884.396.936.113	5.248.722.050.819	635.674.885.293	10,80

Sumber data : BPKAD Provinsi Bali.

Menyoroti masalah rendahnya penyerapan anggaran belanja menurut pakar ekonomi adalah salah satu indikator kegagalan birokrasi. Birokrasi yang handal akan mewujudkan kebijakan dan prosedur serta memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi akan dapat tercapai yaitu memberikan informasi yang tepat, ekonomis, efisiensi dan memberikan informasi terkait kegiatan ekonomi untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. Prasojo et al., (2013) menyebutkan ada tiga indikator penilaian untuk mengetahui bahwa birokrasi itu

dianggap baik, yaitu: 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik, 2) Bebas korupsi, dan 3) Akuntabilitas kinerja. Tiga indikator utama didalam mengukur birokrasi dinilai baik yaitu : 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat, 2) Bebas korupsi atau bebas KKN diukur berdasarkan integritas dan indeks persepsi korupsi dari masyarakat, 3) Akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari nilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berbagai usaha sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi pencapaian target realisasi penyerapan anggaran, seperti memperbaiki kualitas perencanaan Anggaran, meningkatkan kopetansi sumber daya manusia, meningkatkan komitmen organisasi, mengeluarkan kebijakan yang cepat dan tepat, serta menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam mengakses pendapatan, menganggarkan kegiatan, merealisasikan kegiatan dan melaporkan kegiatan. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi karena realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali akan dapat direalisasikan bila didukung oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang memadai. Realisasi penyerapan anggaran belanja dalam penelitian ini sebagai variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Sistem informasi ini merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini merupakan salah satu fasilitas sistem informasi terkomputerisasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam bidang pengelolaan keuangan daerah untuk penguatan persamaan persepsi terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan.

Sistem informasi yang memadai akan bermanfaat dalam merealisasikan anggaran belanja bila didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang andal, sehingga dalam penelitian ini kompetensi sumber daya manusia digunakan sebagai variabel independen. Sumber daya manusia dikatakan berkompetensi bila dengan keterampilannya mereka melaksanakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sedikit atau tidak pernah membuat kesalahan Trotter, (1986). Orang dikatakan berkompetensi juga, bila memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap atau perilaku dan karakteristik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatannya sesuai (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000) Sistem informasi yang memadai akan bermanfaat dalam merealisasikan anggaran belanja bila didukung juga oleh komitmen organisasi sehingga dalam penelitian ini komitmen organisasi digunakan sebagai variabel independen.. Anggota dikatakan komitmen dalam organisasi karena ada keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasinya Sopiha, (2008) Komitmen organisasi merupakan suatu rasa kepercayaan yang kuat terhadap organisasi yang menimbulkan rasa ketersediaan untuk berusaha melakukan yang terbaik demi kemajuan organisasi Faizah, (2007). Konsep Komitmen Organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut.

Sistem informasi yang memadai akan bermanfaat dalam merealisasikan anggaran belanja bila didukung juga oleh regulasi/kebijakan/peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penelitian ini regulasi/kebijakan/peraturan perundang-undangan digunakan sebagai variabel independen. Kewenangan dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan memenuhi syarat-syarat Formil tertentu yaitu :

mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan ialah proses pembuatan Peraturan Negara. dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan Solly, (2009) Regulasi/kebijakan/peraturan perundang-undangan sangat mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran belanja dimana dengan adanya rancangan, pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan tersebut akan dapat memperlancar realisasi penyerapan anggaran belanja karena sebagai payung hukum dalam merealisasikan penyerapan anggaran belanja.

Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) digunakan sebagai Variabel Pemoderasi dan didukung oleh 3 (tiga) variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, Komitmen Organisasi dan variabel regulasi/kebijakan maka realisasi penyerapan anggaran belanja akan dapat direalisasikan sesuai dengan anggaran belanja yang di rencanakan. Terkait dengan realisasi penyerapan anggaran belanja dapat direalisasikan sesuai dengan rencana maka komplik kepentingan antara Prinsipel sebagai pemberi kerja (DPR, Temuan BPK, Masyarakat dan pihak terkait lainnya) dengan Pemerintah Provinsi Bali sebagai pelaksana kerja (Agen) akan dapat dihindari maka teori keagenan sangat berhubungan dalam penelitian ini.

Yustika, (2022) menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran pada awal tahun, yaitu : 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dijadikan sebagai target pelaksanaan kegiatan namun hanya sebagai panduan yang mengakibatkan kurangnya inisiatif untuk melaksanakan program sesuai jadwal karena menganggap waktu pelaksanaan anggaran relatif masih lama. 2. Proses tender kegiatan memerlukan waktu yang lama, bila nilai tender kegiatan yang besar dan pengerjaan kegiatan yang rumit, sesuai dengan aturan harus melalui proses tender yang berbulan-bulan, sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan tersebut diawal tahun



belum dapat dimulai, apalagi jumlah perusahaan yang ikut tender persyaratannya kurang maka dilakukan tender ulang hal tersebut akan semakin menghambat pelaksanaan kegiatan. 3. Adanya beberapa jenis kegiatan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan pada awal tahun. 4. Program kegiatan yang telah dijadwalkan untuk dilaksanakan namun terhambat karena belum adanya petunjuk teknis kegiatan. Prasajo

Purtanto, (2015) penelitian di Kota Tegal bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, komitmen organisasi dan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja terkait pengadaan barang/jasa. Ruwaida et al., (2015) penelitian di Provinsi Aceh bahwa perencanaan anggaran, regulasi, kompetensi sumber daya manusia, teknis kegiatan, koordinasi dan pengadaan barang jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Alumbida et al., (2016) penelitian di Kabupaten Talaud bahwa perencanaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja daerah. Zarinah et al., (2016) di 63 SKPD Kabupaten Aceh Utara bahwa perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Prabowo, (2019) penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu bahwa perencanaan anggaran, sistem pengukuran kinerja ada pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Perencanaan anggaran ada pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja melalui implementasi anggaran berbasis kinerja. Sistem pengukuran kinerja ada pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja melalui implementasi anggaran berbasis kinerja. Penelitian Ramadhani et al., (2019) pada Provinsi Sumatera Barat bahwa regulasi, perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja sedangkan politik anggaran dan sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Penelitian Sirin et al., (2020) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Kompetensi sumber daya manusia dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh evaluasi anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian Hamidah et al., (2020) di Pemerintah Kota Pekanbaru dengan 43 Organisasi Perangkat Daerah bahwa perencanaan anggaran , kompetensi sumber daya manusia, Komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Penelitian Ramdani, (2023) di Pemerintah Kota Bogor berjumlah 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah bahwa seluruh variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, perencana dan pelaksana anggaran, implementasi pengadaan barang dan jasa, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja daerah. Ulandari et al., (2021) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sumber daya manusia dan pengadaan barang / jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Administrasi tidak berpengaruh terhadap perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang / jasa terhadap penyerapan anggaran. Penelitian Kristianingsih et al., (2022) studi empiris pada Perguruan Tinggi Negeri Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek bahwa manajemen anggaran berpengaruh terhadap kualitas penyerapan anggaran. Kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas penyerapan anggaran. Sistem pengendalian internal tidak dapat memoderasi pengaruh manajemen anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas penyerapan anggaran, dan sistem pengendalian internal dapat memoderasi komitmen organisasi terhadap



kualitas penyerapan anggaran. Penelitian Sutono et al., (2022) perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Pengawasan intern dan regulasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja. Penelitian Safpremi et al., (2022) di Pemerintah Kabupaten Pasaman bahwa kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pengadaan barang jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Penelitian Sari et al., (2023) di Pemerintah Kota Palembang dimana perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, akan tetapi kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan latar belakang masalah dan perbedaan temuan hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa sangat memerlukan perhatian khusus untuk diatasi terkait dengan pencapaian target realisasi penyerapan anggaran belanja maka peneliti tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam penelitian dengan judul **“Determinan Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja dimoderasi oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali”** Determinan penelitian ini menggunakan tiga *variabel independen* meliputi kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan regulasi/peraturan/kebijakan. *Variabel dependen* dalam penelitian ini adalah realisasi penyerapan anggaran belanja dan satu *variabel moderasi* adalah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Kompetensi sumber daya manusia sebagai determinan penelitian karena hasil penelitian Ruwaida et al. (2015); Alumbida et al. (2016); Zarinah et al. (2016); Sirin et al. (2020); Hamidah et al. (2020); Ramdani (2023); Ulandari et al. (2021); dan Delia et al. (2021) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja. sedangkan hasil penelitian Purtanto (2015); Ramadhani et al. (2019); Kristianingsih et al. (2022); dan Sari et al. (2023) mengatakan bahwa kompetensi

sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja. Komitmen organisasi sebagai determinan penelitian karena hasil penelitian Purtanto (2015); Alumbida et al. (2016); Hamidah et al. (2020); Ulandari et al. (2021); dan Delia et al. (2021) mengatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja. sedangkan hasil penelitian Sirin et al. (2020); Kristianingsih et al. (2022); dan Sari et al. (2023) mengatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja. Regulasi/peraturan/kebijakan sebagai determinan penelitian karena hasil penelitian Ruwaida et al. (2015); dan Ramadhani et al. (2019) peraturan berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja sedangkan hasil Penelitian Sutono et al. (2022) faktor regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) digunakan sebagai *variabel moderasi* karena terkait dengan penelitian ini sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) masih jarang digunakan sebagai *variabel moderasi* dan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dapat memoderasi *variabel independen* meliputi kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan regulasi/peraturan/kebijakan. terhadap *Variabel dependen* yaitu realisasi penyerapan anggaran belanja di Pemerintah Provinsi Bali.

## **1.2 Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dimana realisasi penyerapan anggaran belanja sisa anggaran belanja terlalu tinggi pada akhir tahun anggaran. Selain itu pegawai jarang mendapat pelatihan khusus sesuai beban kerjanya masing-masing, adanya keterbatasan jumlah pegawai sesuai beban kerjanya masing-masing dan

terbatasnya pegawai yang memiliki pendidikan khusus sesuai beban kerjanya masing-masing, Sisa anggaran belanja terlalu tinggi pada akhir tahun anggaran akan menjadi pertanyaan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik Pusat maupun Daerah sebagai aspirasi rakyat merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Bali atas realisasi penyerapan anggaran belanja yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sisa realisasi penyerapan anggaran belanja semestinya direalisasikan semuanya pada tahun anggaran yang bersangkutan karena dana yang digunakan untuk menganggarkan, sudah membatalkan anggaran belanja kegiatan lain yang semestinya bisa di gunakan untuk menganggarkan kegiatan yang belum dianggarkan tahun lalu. Sisa anggaran belanja terlalu tinggi pada akhir tahun anggaran kegiatan juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bali di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

2. Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian pada studi empiris yang mengangkat topik Determinan Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Dimoderasi Oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan demikian diperlukan studi empiris tambahan untuk memperkuat studi empiris sebelumnya untuk menciptakan hasil studi empiris yang konsisten.

### **1.3 Pembatasan Masalah.**

Merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini terfokus pada Determinan Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja dimoderasi oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali.

### **1.4 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali.
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
3. Apakah regulasi berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali.
4. Apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dapat memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali.
5. Apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dapat memoderasi komitmen organisasi terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali.
6. Apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dapat memoderasi Regulasi/peraturan/kebijakan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali.

**7. 1.5 Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris :

1. Memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali.
3. Memberikan bukti empiris pengaruh regulasi/peraturan/kebijakan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali.

4. Memberikan bukti empiris pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dapat memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali. .
5. Memberikan bukti empiris pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dapat memoderasi komitmen organisasi terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali.
6. Memberikan bukti empiris pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dapat memoderasi Regulasi/peraturan/kebijakan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Bali.

### **1.6 Manfaat Penelitian.**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis bagi banyak pihak, yaitu :

#### **1.6.1 Manfaat Teoretis.**

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengambilan kebijakan kedepannya dan sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu yaitu dengan mengembangkan penelitian lebih lanjut khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pencapaian target realisasi penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Bali.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada teore keagenan. Perspektif teore keagenan memberikan pemahaman adanya konflik kepentingan antara agen dengan principal. Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku principal akan menugaskan Eksekutif yaitu pejabat yang terkait bisa merealisasikan anggaran belanja yang sudah dianggarkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selaku agen melakukan jasa untuk kepentingan



principal, namun agen juga memiliki kepentingan pribadi seperti menunjukkan kinerja yang baik dihadapan principal.

### **1.6.2 Manfaat Praktis.**

1. Menambah pengetahuan dalam bidang penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data hingga penyajian dalam bentuk laporan.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Bali, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi Lembaga Kementerian terkait dalam mencapai tingkatan penyerapan anggaran.
3. Bagi akademik, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya.

### **1.7 Penjelasan Istilah.**

Penjelasan-penjelasan yang diuraikan pada penelitian ini terdapat beberapa istilah atau singkatan yang digunakan yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. SIMDA : Sistem Informasi Manajemen Daerah.
2. SIPKD : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat.
4. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
5. BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
6. Pusdiklat : Pusat Pendidikan dan Latihan.
7. OPD : Organisasi Perangkat Daerah.
8. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. SDM : Sumber Daya Manusia.

### **1.8 Asumsi Penelitian.**

Asumsi penelitian dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan faktor regulasi/kebijakan berpengaruh positif terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD) mampu memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan faktor regulasi/kebijakan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja.

### **1.9 Rencana Publikasi.**

Penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) Sinta 4

